# WALI KOTA SERANG
# PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga integritas Aparatur Sipil Negara, perlu peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui pemberian tambahan penghasilan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, tanggung jawab, dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Serang, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) sampai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
10. Presensi adalah kehadiran pegawai ASN pada jam kerja yang telah ditentukan.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.

## BAB II
## TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

### Pasal 2

(1) Dalam rangka pemberian TPP ASN di bentuk tim pelaksanaan TPP ASN.
(2) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
    b. Perangkat Daerah yang membidangi:
        1. pengelolaan keuangan Daerah;
        2. organisasi;
        3. kepegawaian;
        4. hukum;
        5. perencanaan; dan
        6. pengawasan.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III ...

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Kesatu
Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 3

Besaran TPP ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Pemberian dan Pengurangan Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara
Paragraf 1
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 4

(1) Pemberian TPP diberikan kepada ASN.
(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam setiap bulan pada akhir bulan berjalan.
(3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan dan kemampuan keuangan Daerah.
(4) Pemberian TPP ASN bagi calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pembayaran TPP ASN bagi calon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan ditetapkan surat keputusan pengangkatan dari calon Pegawai Negeri Sipil menjadi PNS;
    b. pembayaran TPP ASN bagi calon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut; dan
    c. dalam hal setelah ditetapkannya surat keputusan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi PNS belum ditetapkan jabatan dan/atau tidak tersedianya rumpun jabatan pada peta jabatan, TPP PNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN dengan acuan kelas jabatan yang digunakan pada saat pegawai tersebut masih menjadi calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya setelah PPPK dilantik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

(1) Pemberian TPP ASN bagi ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN yang ditetapkan.
(2) TPP ASN bagi ASN diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN yang ditetapkan, kepada pegawai dalam keadaan:
    a. menjalankan Cuti besar lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dalam satu bulan dikecualikan Cuti dalam menjalankan ibadah haji;
    b. menjalankan Cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dalam satu bulan;
    c. cuti sakit yang direkomendasikan oleh dokter pemerintah; dan
    d. cuti bersalin untuk anak kesatu, kedua, dan ketiga.

(3) Cuti ...

(3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan dan disetujui oleh atasan langsung.

(4) ketentuan pemberian TPP ASN bagi pegawai yang cuti dalam menjalankan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi penjabat, pelaksana tugas dan pelaksana harian.

Pasal 6

(1) Bagi PNS yang mengalami mutasi, rotasi atau promosi berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan diberikan TPP sesuai dengan jabatan baru.

(2) Bagi PNS yang mengalami mutasi, rotasi atau promosi berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan diberikan TPP sesuai dengan jabatan lama.

Pasal 7

ASN yang meninggal dunia diberikan TPP 1 (satu) bulan penuh yang diterima bulan sebelumnya.

Pasal 8

Selain TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhadap ASN diberikan diberikan sebagai berikut:

a. Bagi Perangkat Daerah berdasarkan pada kriteria kondisi kerja diberikan tambahan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP pada setiap jabatan yang telah ditetapkan, meliputi Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan;

b. Inspektorat berdasarkan kondisi kerja diberikan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP ASN pada setiap jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

(1) TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 10

(1) Pengurangan TPP dikenakan kepada:
   a. pegawai ASN yang melanggar ketentuan jam kerja; dan
   b. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin.

(2) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberi pengurangan TPP sebesar:
   a. 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
   b. 2% (dua persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak mengikuti apel pagi, apel gabungan, dan upacara resmi kenegaraan;
   c. 100% (seratus persen) bagi pegawai yang tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan;

d. pegawai ...

d. pegawai ASN yang terlambat masuk kerja, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
   1. keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
   2. keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, pengurangan sebesar 1% (satu persen);
   3. keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit, pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
   4. keterlambatan 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

e. pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
   1. pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
   2. pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, pengurangan sebesar 1% (satu persen);
   3. pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit, pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
   4. pulang sebelum waktunya 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor, pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

(3) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

| | | |
|---|---|---|
| a. | hari Senin sampai dengan hari Kamis | : pukul 07.30 s.d. pukul 16.00 WIB |
| | waktu istirahat | : pukul 12.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB |
| b. | hari Jumat | : pukul 07.30 WIB s.d. pukul 16.30 WIB |
| | waktu istirahat | : pukul 11.30 WIB s.d. pukul 13.00 WIB |

(4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dengan:
   a. apel pagi pada pukul 07.30 WIB;
   b. apel pagi wajib dilaksanakan oleh setiap Pegawai ASN pada Perangkat Daerah dan/atau dapat dilakukan penggabungan oleh beberapa Perangkat Daerah dalam 1 (satu) kawasan;
   c. apel pagi pada setiap hari Senin dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di halaman kawasan pusat pemerintahan Daerah dan/atau tempat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan; dan
   d. apel pagi tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jam kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

(6) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 11 ...

Pasal 11

(1) Selain apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dilaksanakan apel hari kesadaran nasional oleh seluruh Perangkat Daerah setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan/atau tanggal yang telah ditentukan dengan pertimbangan tertentu di halaman kawasan pusat pemerintahan Daerah dan/atau tempat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pegawai ASN yang diperbolehkan tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, sebagai berikut:
   a. memiliki tugas spesifik/kekhususan, karakteristik dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat;
   b. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan surat perintah tugas; dan
   c. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(3) Perhitungan kehadiran, fleksibilitas waktu kerja dapat diperhitungkan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 12

(1) Pengurangan TPP ASN untuk pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) huruf b diberlakukan kepada:
   a. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsung;
   b. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsung;
   c. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsung;
   d. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsung;
   e. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsung;
   f. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsung;
   g. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsung;
   h. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan diberikan sesuai dengan jabatan pelaksana yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsung; dan/atau

i. pegawai ...

i. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, tidak diberikan TPP sejak bulan berikutnya yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsung.

Pasal 13

Pegawai yang hasil penilaian capaian kinerjanya dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai target yang ditetapkan, dikenakan pengurangan secara berjenjang dengan perhitungan sebagai berikut:

a. jika capaian kinerja pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan, dikurangi 10% (sepuluh persen);
b. jika capaian kinerja pegawai berpredikat kurang, dikurangi 15% (lima belas persen);
c. jika capaian kinerja pegawai berpredikat sangat kurang, dikurangi 20% (dua puluh persen);
d. jika Pegawai yang tidak membuat laporan penilaian kinerja pegawai dalam 1 (satu) bulan, dikurangi sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
e. jika Pegawai yang tidak membuat laporan penilaian kinerja pegawai pada bulan berikutnya dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 14

Pengurangan TPP ASN paling banyak 100% (seratus persen) untuk setiap bulannya.

Pasal 15

TPP tidak diberikan kepada:

a. pegawai ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung;
b. pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
c. pegawai ASN dan calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
d. pegawai ASN yang sedang dalam penugasan pada instansi Pemerintah di luar instansi Pemerintah Kota Serang, kecuali tidak menerima tunjangan/insentif dari instansi tempat bertugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan instansi tempat bertugas;
e. pegawai ASN instansi pusat yang diberikan penugasan pada Perangkat Daerah, kecuali tidak menerima tunjangan/insentif dari instansi asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan instansi asal; atau
f. pegawai ASN yang mutasi masuk pada Perangkat Daerah Kota Serang sampai dengan tersedianya anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Ketiga

Penangguhan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 16

Penangguhan TPP diberlakukan kepada:

a. pegawai ASN sebagai wajib lapor yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) pada waktu yang ditetapkan, diberikan sanksi penangguhan TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota terkait wajib Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN);

b. pegawai ...

b. pegawai ASN sebagai wajib lapor yang tidak menyampaikan laporan pajak/Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan sampai batas waktu yang ditetapkan, sampai dengan diselesaikannya kewajiban pelaporan yang dibuktikan dengan bukti terima laporan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
c. pegawai ASN yang menguasai barang milik Daerah tanpa bukti penunjukan yang sah, TPP ASN tidak dibayarkan sampai dengan diserahkanya barang milik Daerah; dan/atau
d. pegawai yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Bagian Keempat
Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 17

(1) Penilaian TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
(2) Penilaian TPP ASN dan calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
    a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN dan calon Pegawai Negeri Sipil; dan
    b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN dan calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

(1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
    a. pelaksanaan tugas; dan
    b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
    a. uraian tugas jabatan;
    b. indikator kinerja utama;
    c. perjanjian kinerja; dan
    d. indikator kinerja individu.
(3) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Pasal 19

(1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
(2) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
(3) Penilaian disiplin kerja ditentukan berdasarkan indikator tingkat kedisiplinan pegawai ASN, meliputi:
    a. tingkat kehadiran pegawai ASN; dan
    b. hukuman disiplin.

Pasal 20

(1) Tingkat kehadiran pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
    a. tidak masuk bekerja;
    b. terlambat masuk bekerja;

c. pulang ...

c. pulang sebelum waktunya;
d. meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya; dan
e. tidak mengikuti apel pagi/apel gabungan/upacara resmi kenegaraan.

(2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.

(3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis elektronik dan/atau manual yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara

Pasal 21

Tata cara pemberian dan pembayaran TPP ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan atas pelaksanaan pemberian TPP ASN bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP ASN di lingkungan kerjanya.

(4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah melakukan tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan fungsi dan kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dimilikinya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Pengukuran kinerja bulan Januari menjadi acuan pembayaran TPP ASN tahun 2025.

(2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Februari 2025
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 380

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TPP ASN sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

A. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan PPPK:

| No. | | Uraian | Kelas Jabatan | Satuan | Besaran (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Sekretaris Daerah | 15 | org/bln | 44.000.000,00 |
| 2. | a. | Inspektur | 14 | org/bln | 23.600.000,00 |
| | b. | Asisten Sekretaris Daerah | 14 | org/bln | 23.500.000,00 |
| | c. | 1. Kepala BPKAD<br>2. Kepala Bappeda<br>3. Kepala Bapenda<br>4. Kepala Disdukcapil | 14 | org/bln | 20.000.000,00 |
| | d. | Staf Ahli Wali Kota | 13 | org/bln | 18.000.000,00 |
| | e. | Kepala Perangkat Daerah lainnya dan Kepala BPBD (klasifikasi A) | 14 | org/bln | 17.000.000,00 |
| 3. | a. | Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah | 11 | org/bln | 13.500.000,00 |
| | b. | Sekretaris Inspektorat | 12 | org/bln | 13.000.000,00 |
| | c. | Inspektur Pembantu Inspektorat | 11 | org/bln | 13.000.000,00 |
| | d. | 1. Direktur RSUD<br>2. Kepala Pelaksana BPBD (klasifikasi B)<br>3. Camat<br>4. Sekretaris pada BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan Disdukcapil | 12 | org/bln | 11.500.000,00 |
| | e. | 1. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD<br>2. Sekretaris Perangkat Daerah Lainnya dan Sekretaris BPBD (klasifikasi A) | 12 | org/bln | 10.000.000,00 |
| 4. | a. | 1. Kepala Bidang pada BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan Disdukcapil | 11 | org/bln | 9.000.000,00 |
| | b. | Kepala Bidang pada Perangkat Daerah lain, Sekretaris Camat, dan Koordinator (Fungsional Madya pada DPMPTSP) serta Kepala Bidang pada BPBD (klasifikasi A) | 11 | org/bln | 8.500.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | a. | Kepala Subbagian dan Fungsional Ahli Muda pada Sekretariat Daerah (hasil penyetaraan jabatan) | 8 | org/bln | 7.750.000,00 |
| | b. | Kepala Subbagian pada Inspektorat | | | |
| | | 1. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi, dan Pelaporan Inspektorat | 8 | org/bln | 7.700.000,00 |
| | | 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat | 9 | org/bln | 7.500.000,00 |
| | c. | 1. Kepala Subbagian/ Bidang/Seksi/ Fungsional Ahli Muda (hasil penyetaraan jabatan) pada BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan Disdukcapil | 8 | org/bln | 7.400.000,00 |
| | | 2. Sekretaris Pelaksana BPBD (klasifikasi B) | 8 | org/bln | 7.400.000,00 |
| | | 3. Kepala UPTD pada Perangkat Daerah | 9 | org/bln | 7.400.000,00 |
| | d. | Kepala Kelurahan | 9 | org/bln | 7.400.000,00 |
| | e. | Kepala Subbagian/ Fungsional Ahli Muda (Hasil Penyetaraan) pada Perangkat Daerah Lainnya | | | |
| | | 1. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan/ Fungsional Ahli Muda (Hasil Penyetaraan) | 8/9 | org/bln | 7.400.00,00 |
| | | 2. Kepala Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan/ Fungsional Ahli Muda (Hasil Penyetaraan) | 8 | org/bln | 6.900.000,00 |
| | | 3. Kepala Subbagian Keuangan/ Fungsional Ahli Muda (Hasil Penyetaraan) | 8 | org/bln | 6.800.000,00 |
| | | 4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 8 | org/bln | 6.600.000,00 |
| | f. | Kepala Subbidang/Kepala Seksi/Fungsional Ahli Muda (Hasil Penyetaraan) pada Perangkat Daerah lainnya | 8 | org/bln | 6.400.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | a. | Kepala Subbagian Keuangan, dan PEP pada Kecamatan | 8 | org/bln | 5.800.000,00 |
| | b. | Sekretaris Kelurahan | 8 | org/bln | 5.500.000,00 |
| | c. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan | 8 | org/bln | 5.100.000,00 |
| | d. | Eselon IV.b lainnya | 8 | org/bln | 5.000.000,00 |
| 7. | a. | Pelaksana pada Sekretariat Daerah: | | | |
| | | 1. Golongan IV<br>2. Golongan III<br>3. Golongan II<br>4. Golongan I | 5/6/7 | org/bln | 3.400.000,00<br>3.100.000,00<br>2.900.000,00<br>2.700.000,00 |
| | b | Pelaksana pada Inspektorat: | | | |
| | | 1. Golongan IV<br>2. Golongan III<br>3. Golongan II<br>4. Golongan I | 5/6/7 | org/bln | 3.200.000,00<br>2.900.000,00<br>2.700.000,00<br>2.500.000,00 |
| | c. | Pelaksana pada Perangkat Daerah lainnya: | | | |
| | | 1. Golongan IV<br>2. Golongan III<br>3. Golongan II<br>4. Golongan I | 5/6/7 | org/bln | 2.600.000,00<br>2.300.000,00<br>2.100.000,00<br>2.000.000,00 |

B. Jabatan Fungsional Tertentu:

| No. | Uraian | Kelas Jabatan | Satuan | Besaran (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Pendidikan sebagai: | | | |
| | a. Guru Sertifikasi dan Nonsertifikasi: | | | |
| | 1. Ahli Utama | 13 | org/bln | 1.500.000,00 |
| | 2. Ahli Madya | 11 | org/bln | 1.050.000,00 |
| | 3. Ahli Muda | 9 | org/bln | 800.000,00 |
| | 4. Ahli Pertama | 8 | org/bln | 650.000,00 |
| | b. Pengawas Sekolah: | | | |
| | 1. Ahli Utama | 13 | org/bln | 1.500.000,00 |
| | 2. Ahli Madya | 11 | org/bln | 1.050.000,00 |
| | 3. Ahli Muda | 9 | org/bln | 800.000,00 |
| | 4. Ahli Pertama | 8 | org/bln | 650.000,00 |
| | c. Pamong Belajar: | | | |
| | 1. Ahli Madya | 11 | org/bln | 3.300.000,00 |
| | 2. Ahli Muda | 9 | org/bln | 3.100.000,00 |
| | 3. Ahli Pertama | 8 | org/bln | 3.000.000,00 |
| | d. Penilik PAUD/Kesetaraan dan Keaksaraan/Kursus: | | | |
| | 1. Ahli Madya | 11 | org/bln | 3.300.000,00 |
| | 2. Ahli Muda | 9 | org/bln | 3.100.000,00 |
| | 3. Ahli Pertama | 8 | org/bln | 3.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pejabat Fungsional tertentu sebagai Apoteker/Asisten Apoteker /Penyuluh/Bidan/Perawat/Analis/Fisioterapis/Nutrisionis Sanitarian/Perekam Medis/Pranata Lab dan Jabatan Fungsional lainnya: | | | | |
| | a. | Keahlian: | | | |
| | | 1. Utama | 13 | org/bln | 3.700.000,00 |
| | | 2. Madya | 11 | org/bln | 3.250.000,00 |
| | | 3. Muda | 9 | org/bln | 2.750.000,00 |
| | | 4. Pertama | 8 | org/bln | 2.550.000,00 |
| | b. | Keterampilan: | | | |
| | | 1. Penyelia | 8 | org/bln | 2.450.000,00 |
| | | 2. Pelaksana Lanjutan/Mahir | 7 | org/bln | 2.350.000,00 |
| | | 3. Pelaksana | 6 | org/bln | 2.250.000,00 |
| | | 4. Pelaksana Pemula | 5 | org/bln | 2.200.000,00 |
| 3. | Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Auditor: | | | | |
| | a. | Ahli Utama | 13 | org/bln | 15.000.000,00 |
| | b. | Ahli Madya | 11 | org/bln | 12.500.000,00 |
| | c. | Ahli Muda | 9 | org/bln | 10.500.000,00 |
| | d. | Ahli Pertama | 8 | org/bln | 8.500.000,00 |
| 4. | Pejabat Fungsional Tertentu sebagai P2UPD: | | | | |
| | a. | Ahli Utama | 13 | org/bln | 15.000.000,00 |
| | b. | Ahli Madya | 11 | org/bln | 12.500.000,00 |
| | c. | Ahli Muda | 9 | org/bln | 10.500.000,00 |
| | d. | Ahli Pertama | 8 | org/bln | 8.500.000,00 |
| 5. | Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Spesialis: | | | | |
| | a. | Ahli Utama | 13 | org/bln | 11.000.000,00 |
| | b. | Ahli Madya | 11 | org/bln | 9.000.000,00 |
| | c. | Ahli Muda | 9 | org/bln | 7.500.000,00 |
| | d. | Ahli Pertama | 8 | org/bln | 6.600.000,00 |
| 6. | Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Hewan, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku: | | | | |
| | a. | Ahli Utama | 13 | org/bln | 8.200.000,00 |
| | b. | Ahli Madya | 11 | org/bln | 6.900.000,00 |
| | c. | Ahli Muda | 9 | org/bln | 5.300.000,00 |
| | d. | Ahli Pertama | 8 | org/bln | 4.300.000,00 |
| 7. | Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pengantar Kerja, Mediator, Hubungan Indutrial, Penguji Keselamatan dan Kesehatan, Mediator Hubungan Industrial, Pengawas Ketenagakerjaan, Instruktur, Pustakawan, Arsiparis, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pelatih Olahraga, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Pranata Komputer, Sandiman, Pranata Hubungan Masyarakat, Statistisi, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Pamong Budaya, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Penata Kelola Penanaman Modal, Penata Perizinan dan fungsional lainnya yang sejenis: | | | | |
| | a. | Keahlian: | | | |
| | | 1. Utama | 13 | org/bln | 8.500.000,00 |
| | | 2. Madya | 11 | org/bln | 7.000.000,00 |
| | | 3. Muda | 9 | org/bln | 5.400.000,00 |
| | | 4. Pertama | 8 | org/bln | 4.400.000,00 |
| | b. | Keterampilan : | | | |
| | | 1. Penyelia | 8 | org/bln | 4.000.000,00 |
| | | 2. Pelaksana Lanjutan | 7 | org/bln | 3.800.000,00 |
| | | 3. Pelaksana | 6/7/8 | org/bln | 3.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Penera/Ahli Tera, Pranata Laboratorium Kemetrologian, Penguji Mutu Barang, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Pengawas Perdagangan, Penjamin Mutu Produk, Pembina Industri, Asesor Manajemen Mutu Industri, Pengawas Koperasi, Analis Perdagangan dan fungsional lainnya yang sejenis: | | | | |
| | a. | Keahlian: | | | |
| | | 1. Utama | 13 | org/bln | 8.500.000,00 |
| | | 2. Madya | 11 | org/bln | 7.000.000,00 |
| | | 3. Muda | 9 | org/bln | 5.400.000,00 |
| | | 4. Pertama | 8 | org/bln | 4.400.000,00 |
| | b. | Keterampilan: | | | |
| | | 1. Penyelia | 8 | org/bln | 4.000.000,00 |
| | | 2. Pelaksana Lanjutan | 14 | org/bln | 3.800.000,00 |
| | | 3. Pelaksana | 6/7/8 | org/bln | 3.000.000,00 |
| 9. | Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Peneliti/Perencana/Widyaiswara/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Asesor, Analis Kebijakan, Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Perisalah Legislatif, Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis Pengembangan Kompetensi serta fungsional lainnya yang sejenis; | | | | |
| | a. | Ahli Utama | 13 | org/bln | 9.000.000,00 |
| | b. | Ahli Madya | 11/12 | org/bln | 8.000.000,00 |
| | c. | Ahli Muda | 9/10 | org/bln | 7.000.000,00 |
| | d. | Ahli Pertama | 8 | org/bln | 6.000.000,00 |
| 10. | Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa: | | | | |
| | a. | Ahli Madya | 11 | org/bln | 12.000.000,00 |
| | b. | Ahli Muda | 9 | org/bln | 10.000.000,00 |
| | c. | Ahli Pertama | 8 | org/bln | 8.000.000,00 |
| 11. | Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Penata Ruang, Pembina Jasa Konstruksi, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Teknik Pengairan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Pengawas Lingkungan Hidup, Penyuluh Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan, Pengelola Sumber Daya Air, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan, Penata Kelola Perumahan, Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Penata Laksana Barang serta fungsional lainnya yang sejenis: | | | | |
| | a. | Keahlian: | | | |
| | | 1. Utama | 13 | org/bln | 8.500.000,00 |
| | | 5. Madya | 11 | org/bln | 7.000.000,00 |
| | | 6. Muda | 9 | org/bln | 5.400.000,00 |
| | | 7. Pertama | 8 | org/bln | 4.400.000,00 |
| | b. | Keterampilan: | | | |
| | | 1. Penyelia | 8 | org/bln | 4.000.000,00 |
| | | 2. Pelaksana Lanjutan | 7 | org/bln | 3.800.000,00 |
| | | 3. Pelaksana | 6/7/8 | org/bln | 3.000.000,00 |
| 12. | Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Analis Kebencanaan, Pranata Kebencanaan dan fungsional lainnya: | | | | |
| | a. | Ahli Utama | 13 | org/bln | 8.500.000,00 |
| | b. | Ahli Madya | 11 | org/bln | 7.000.000,00 |
| | c. | Ahli Muda | 9 | org/bln | 5.400.000,00 |
| | d. | Ahli Pertama | 8 | org/bln | 4.400.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pengawas Bibit Ternak, Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Pakan, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengelola Kesehatan Ikan, Medik Veteriner, Analis Ketahanan Pangan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Perikanan, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Analis Akuakultur serta fungsional lainnya: | | | | |
| | a. | Keahlian: | | | |
| | | 1. Utama | 13 | org/bln | 8.500.000,00 |
| | | 2. Madya | 11 | org/bln | 7.000.000,00 |
| | | 3. Muda | 9 | org/bln | 5.400.000,00 |
| | | 4. Pertama | 8 | org/bln | 4.400.000,00 |
| | b. | Keterampilan: | | | |
| | | 1. Penyelia | 8 | org/bln | 4.000.000,00 |
| | | 2. Pelaksana Lanjutan | 7 | org/bln | 3.800.000,00 |
| | | 3. Pelaksana | 6/7/8 | org/bln | 3.000.000,00 |

C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut:

| No. | Uraian | Kelas Jabatan | Satuan | Besaran (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tenaga Teknis | | | |
| | a. PPPK dengan Keputusan Pengangkatan Tahun 2020 s.d. 2022 | 7 | org/bln | 2.100.000,00 |
| | b. PPPK dengan Keputusan Pengangkatan mulai Tahun 2023 | | | 1.000.000,00 |
| 2. | Tenaga Teknis Kesehatan (Nondokter) | | | |
| | a. Keterampilan:<br>- Pelaksana Pemula | 5 | org/bln | 600.000,00 |
| | b. Keahlian:<br>- Pertama | 7 | org/bln | 850.000,00 |
| 3. | Tenaga Teknis Kesehatan (Dokter): | | | |
| | a. Dokter Umum. | 7 | org/bln | 4.300.000,00 |
| | b. Dokter Spesialis | | | 6.600.000,00 |
| 4. | Guru | | | |
| | a. Keputusan Pengangkatan Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 | 7 | org/bln | 400.000,00 |
| | b. Keputusan Pengangkatan mulai Tahun 2023 | 7 | org/bln | 100.000,00 |

D. Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Kelas Jabatan | Satuan | Besaran (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pengelolaan Keuangan | | | |
| | a. Bendahara Pengeluaran | | | |
| | - Nilai pagu belanja sampai dengan Rp. 1 miliar/ tahun | 7 | org/bln | 2.750.000,00 |
| | - Nilai pagu belanja di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/ tahun | 7 | org/bln | 3.000.000,00 |
| | - Nilai pagu belanja di atas Rp.10 miliar sampai dengan 50 miliar/tahun | 7 | org/bln | 3.250.000,00 |
| | - Nilai pagu belanja di atas Rp. 50 miliar/ tahun | 7 | org/bln | 3.500.000,00 |
| | b. Bendahara Penerimaan | | | |
| | - Nilai pagu target penerimaan sampai dengan Rp. 500 juta | 7 | org/bln | 2.400.000,00 |
| | - Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 miliar | 7 | org/bln | 2.550.000,00 |
| | - Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar | 7 | org/bln | 2.750.000,00 |
| | - Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 5 miliar | 7 | org/bln | 3.250.000,00 |
| | c. Bendahara Pembantu | 7 | org/bln | 2.550.000,00 |
| | d. Bendahara JKN | 7 | org/bln | 2.550.000,00 |
| 2. | Pengelola Aset | | | |
| | a. Pengurus Barang Pengguna: | | | |
| | - Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun | 7 | org/bln | 2.750.000,00 |
| | - Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/ tahun | 7 | org/bln | 2.950.000,00 |
| | - Nilai belanja modal di atas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/ tahun | 7 | org/bln | 3.050.000,00 |
| | - Nilai belanja modal di atas s.d Rp.50 miliar/ tahun | 7 | org/bln | 3.200.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | b. | Pembantu Pengurus Barang Pengguna: | | | |
| | | - Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun | 7 | org/bln | 2.650.000,00 |
| | | - Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar/tahun | 7 | org/bln | 2.750.000,00 |
| | | - Nilai belanja modal di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/ tahun | 7 | org/bln | 2.850.000,00 |
| | | - Nilai belanja modal di atas Rp.50 miliar/tahun | 7 | org/bln | 2.950.000,00 |
| 3. | Pelaksana sebagai Penilai PBB-P2: | | | | |
| | a. | Golongan IV | 5/6/7 | org/bln | 4.150.000,00 |
| | b. | Golongan III | | org/bln | 3.600.000,00 |
| | c. | Golongan II | | org/bln | 2.950.000,00 |
| 4. | Pelaksana sebagai Operator Konsul PBB-P2: | | | | |
| | a. | Golongan IV | 5/6/7 | org/bln | 3.650.000,00 |
| | b. | Golongan III | | org/bln | 3.200.000,00 |
| | c. | Golongan II | | org/bln | 2.700.000,00 |
| 5. | Pelaksana sebagai Admin Utama SIPD/SIKD/Sim Gaji Taspen/Simral: | | | | |
| | a. | Golongan IV | 5/6/7 | org/bln | 4.750.000,00 |
| | b. | Golongan III | | org/bln | 4.500.000,00 |
| | c. | Golongan II | | org/bln | 3.700.000,00 |

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI